

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru dalam Rangka Penyelenggaraan RSBI di SMAN Mojoagung sesuai Permendiknas 16 tahun 2007

Samsudi

Mahasiswa Magister Kebijakan Publik, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

Abstract

RSBI, is an educational program established by the Minister of Education by Law. 20 of 2003 article 50, paragraph 3 which states that the Government and the Local Government organizes at least one education at all levels of education to be developed into an international educational unit. Pioneering International School is a government effort to create quality schools. Quality improvement is expected to reduce the number of students who study abroad.

Qualitative research is a descriptive study, conducted at SMAN Mojoagung Jombang district. This study used purposive sampling, with data collected using interviews, observation and documentation (all three together). Then the results are presented in narrative form. This study aims to describe the implementation of the policy R-SMA-BI in SMAN Mojoagung in view of factors How teachers' competence development policy implementation within the framework of the implementation of SMA Mojoagung RSBI in accordance with Permendiknas 16 of 2007 concerning standards of academic qualifications and competence of teachers. And is expected to be one of the instruments in an effort monitoring program as recommending steps to improve the implementation of the R-SMA-BI is running at SMAN Mojoagung.

The results of this study showed a Mojoagung SMAN efforts to implement the No Permendiknas. 16 in 2007. This is evidenced by a certified teacher there are 5 S2 and in accordance with the subjects taught in school only 3 people or 5.45% of the total, amounting to 55 educators who are supposed to 30% of qualified S2/S3 including TOEFL test > 500. In addition to the policy of the provincial government and local government in this district Jombang to encourage the development of quality education in East Java, especially in high school Mojoagung. One of the policy is to provide scholarships for teachers to continue their studies S2 and S3.

Keywords: RSBI, Competency of the teacher, Human Resources

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan

yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Ketertinggalan dari negara-negara tetangga dalam berbagai bidang di era globalisasi menyebabkan pemerintah terdorong untuk memacu diri memiliki standar internasional, dan sektor pendidikan termasuk yang didorong untuk berstandar internasional. Dorongan itu bahkan dicantumkan di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat (3) yang berbunyi, "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional".

Latar belakang terpilihnya SMA Negeri Mojoagung sebagai RSBI berawal ketika sekolah tersebut ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelaksana sekolah model percontohan pada tahun 1999. Program sekolah model percontohan ini berakhir seiring dengan upaya pemerintah menyelenggarakan RSBI

sebagai realisasi dari UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat (3) yang menyatakan bahwa semua pemerintah, baik pusat maupun daerah harus mempunyai satuan pendidikan bertaraf internasional untuk semua jenjang pendidikannya.

Terkait dengan kualitas guru, sekolah harus mengembangkan program peningkatan kompetensi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidikan guru, yaitu minimal 30% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A. Berikut adalah tabel gambaran tenaga pendidik di SMAN Mojoagung.

Tabel I. Tenaga Pendidik SMAN Mojoagung 2012-2013

Ijazah Tertinggi	Status Kepegawaian	
	PNS	GTT
S-2	5	-
S-1	38	12
Jumlah	43	12

Sumber: Data Primer, diolah

Ketertarikan peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan RSBI di SMA Negeri Mojoagung terkait kualifikasi dan kompetensi guru, mendasari dipilihnya judul penelitian " implementasi kebijakan pengembangan kompetensi guru dalam rangka penyelenggaraan RSBI di SMA Negeri Mojoagung sesuai dengan Permendiknas No.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru".

Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi kebijakan pengembangan kompetensi guru dalam rangka penyelenggaraan RSBI di SMA Negeri Mojoagung sesuai dengan Permendiknas No.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah kami sampaikan, maka rumusan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi

kebijakan R-SMA-BI di SMAN Mojoagung Kabupaten Jombang.

Tinjauan Pustaka

Studi terdahulu yang memberikan gambaran terhadap penulisan ini dilakukan oleh Sri Roekminiati dengan judul Implementasi program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (Studi Deskriptif Tentang Implementasi Program R-SMA-BI Dalam Perspektif Van Meter dan Van Horn Di Kabupaten Sidoarjo) pada tahun 2010.

Sedangkan penulisan kali ini penulis cenderung mendeskripsikan implementasi kebijakan pengembangan kompetensi guru dalam rangka penyelenggaraan RSBI di SMA Negeri Mojoagung sesuai dengan Permendiknas No.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penulisan sebelumnya memiliki kecenderungan untuk menggambarkan tentang implementasi program. Penelitian ini meneliti dan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kompetensi guru dalam rangka penyelenggaraan RSBI di SMAN Mojoagung sesuai dengan Permendiknas No.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik terbentuk dari dua kata: kebijakan dan publik. Kebijakan (*policy*) adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the outhority, formal or informal*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah:

"...setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan."

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam pandangan Anderson (1975), kebijakan publik bersifat *non-self executing*, artinya baru akan menimbulkan efek tertentu, setelah melewati tahap implementasi atau diimplementasikan. Tanpa melalui tahap implementasi, kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana. Karena itu, studi kebijakan publik tidak dapat mengabaikan tahapan implementasi sebuah proses kebijakan (Anderson, 1975:92).

Definisi serupa, dikemukakan Jones (1991) sendiri yang menegaskan implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan ke arah pelaksanaan suatu program (kebijakan), sehingga dapat menimbulkan hasil-hasil tertentu,

Pressman dan Wildavsky dalam Wahab (1997:65) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan.

Proses Implementasi Kebijakan

Menurut Parson (2005) Secara konseptual, pendekatan terhadap studi implementasi dapat dilakukan dari beberapa sudut pandang atau model, diantaranya. adalah pendekatan berdasarkan: Analisis kegagalan, Model Rasional ("top-down"), Kritik "bottom-up" terhadap model "top-down", dan Teori "hybrid".

Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.

Disposition berkenaan dengan ketersediaan diri para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses

implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektifitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga negara dan/atau pemerintah. Ini merupakan contoh dari dimensi keempat yang disebutkan Edward III.

Hal ini mengingat Program R-SMA-BI adalah kebijakan yang jauh dari unsur politik dan yang diutamakan disini adalah tercapainya tujuan dari program tersebut. Hal ini relevan dengan pernyataan Van Horn dan Van Meter (1975:463-464).

"Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika-dan hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil".

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya di singkat SBI menurut Panduan Penyelenggaraan Program Rintisan SMA Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan / atau negara maju lainnya.

Merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Departemen Pendidikan Nasional menetapkan visi pendidikan nasional :

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan: INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF (Insan Kamil/Insan Paripurna).

Mempertajam harapan di atas, Direktorat Pembinaan SMA menetapkan visi pengembangan SMA sebagai berikut:

Terwujudnya instansi profesional, akuntabel, kuat dan berwibawa sebagai pendorong menuju Sekolah Menengah Atas mandiri berskala nasional dan internasional.

Visi tersebut memiliki implikasi bahwa penyiapan manusia bertaraf internasional memerlukan upaya-upaya yang dilakukan secara intensif, terarah, terencana, dan sistematis agar dapat mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, damai, dihormati, dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Visi SMA bertaraf internasional, yaitu mencirikan wawasan kebangsaan, memberdayakan seluruh potensi, kecerdasan dan meningkatkan daya saing global perlu dijabarkan ke dalam misi SMA bertaraf internasional.

Program R-SMA-BI

Untuk mewujudkan SMA bertaraf internasional, Pertama, pengembangan kemampuan sumber daya manusia modernisasi manajemen dan kelembagaan. Kedua, melakukan konsolidasi untuk menemukan praktek yang baik dan pelajaran yang dapat dipetik baik melalui diskusi fokus secara luas melalui lokakarya atau seminar dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

a. Tujuan Umum

Pengembangan program R-SMA-BI bertujuan meningkatkan kinerja sekolah dalam mewujudkan situasi belajar dan proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional secara optimal dalam mengembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Tujuan Khusus

Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dalam menyiapkan lulusan SMA yang memiliki kompetensi seperti

yang tercantum di dalam Standar Kompetensi Lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan berdaya saing pada taraf internasional yang memiliki karakter, sebagai berikut:

Kriteria R-SMA-BI

1. Sekolah Menengah Atas Negeri dan swasta yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan terakreditasi A.
2. Kepala sekolah memenuhi standar nasional pendidikan, berkompeten dalam pengelolaan manajemen mutu pendidikan, serta mampu mengoperasikan komputer, dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
3. Memiliki tenaga pengajar fisika, kimia, biologi, matematika dan mata pelajaran lainnya yang berkompeten dalam menggunakan ICT dan pengantar bahasa Inggris.
4. Tersedia sarana prasarana yang memenuhi standar untuk menunjang proses pembelajaran bertaraf internasional antara lain: Memiliki dana yang cukup untuk membiayai pengembangan program rintisan SMA bertaraf internasional. Penyelenggaraan sekolah dalam satu shift (tidak double shift). Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan minimal 9 (sembilan) atau setara dengan 288 siswa. Memiliki lahan minimal 10.000 m². Memiliki akses jalan masuk yang mudah dilalui oleh kendaraan roda empat.

Teori Kompetensi Profesional Guru

Menurut Mitrani, Palziel and Fitt, (1992; 236), Spencer & Spencer, (1993;139), *competency define as people based characteristic and implication on job effectiveness*. Kompetensi dapat dibagi atas dua (2) kategori yaitu "threshold" dan "differentiating"

6.1. Pembahasan

Dalam bukunya *The Implementation Games*, Eugene Bardach dalam Charles O. Jones (1991:293) mengemukakan:

"...Adalah cukup sulit untuk membuat

sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap sebagai klien”

Charles O. Jones menggaris bawahi pernyataan Bardach, bahwa implementasi kebijakan merupakan langkah yang paling sulit dalam proses kebijakan publik. Jika Bardach memunculkan bahwa adanya kesulitan dalam implementasi itu dikarenakan adanya kesulitan dalam "mentransformasikan" tujuan-tujuan kebijakan kepada proses pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan penelitian di lapangan disajikan beberapa variabel mempengaruhi proses implementasi kebijakan Rintisan Sekolah Menengah Atas Bataraf Internasional (R-SMA-BI) di Jombang dengan mengadopsi teori model implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

Pada fase rintisan, ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu; pertama, tahap pengembangan kemampuan sumber daya manusia, modernisasi manajemen, dan kelembagaan, dan kedua, tahap konsolidasi.

Implementasi Kebijakan Guru

Disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn (1975:464), dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen, seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang dinyatakan kriteria dan evaluasi kinerja kebijakan. Akan tetapi dalam beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus deduksikan oleh peneliti perorangan. Pada akhirnya, pilihan ukuran-ukuran pencapaian tergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian. Tujuan khusus

program R-SMA-BI dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 adalah untuk meningkatkan standar kualitas akademik dan kompetensi guru.

Pelaksanaan RSBI secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat 3 yang menyatakan bahwa “ pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu-satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional ”.

Peningkatan Sumberdaya Tenaga Pendidik

Ada tiga kegiatan penting yang diperlukan oleh guru untuk bisa meningkatkan kualitasnya sehingga bisa terus menanjak pangkatnya sampai jenjang kepangkatan tertinggi. *Pertama*, para guru harus memperbanyak tukar pikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman mengembangkan materi pelajaran dan berinteraksi dengan peserta didik. *Kedua*, akan lebih baik kalau apa yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang dihadiri para guru adalah merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para guru sendiri. Dengan demikian guru harus melakukan penelitian. *Ketiga*, guru harus membiasakan diri untuk mengkomunikasikan hasil penelitian yang dilakukan, khususnya lewat media cetak.

Standar Kualifikasi Akademik

Untuk R-SMA-BI harus berpendidikan S2/S3 yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Idealnya kualifikasi pendidikan guru sekolah bertaraf internasional minimum 30 % berpendidikan S2/S3 serta sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Di SMAN Mojoagung dari 9,09% atau sebanyak 5 guru yang beirjazah S2 dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah hanya 3 orang atau 5,45%. dari keseluruhan pendidik yang berjumlah 55 orang.

Seperti disampaikan oleh Van Meter dan Van Hom (1975:465) tahap-tahap tertentu dan keseluruhan proses implementasi

menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya – sumber daya itu nihil maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Menurut peneliti hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur atau mengharuskan mengambil studi lanjut sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, apalagi ketika sekolah belum berstatus R-SMA-BI. Dengan adanya regulasi yang mengatur yaitu pada Permendiknas Nomor 78 tahun 2009 pasal 6 hendaknya bagi tenaga pendidik yang ingin melanjutkan studi linier dengan mata pelajaran yang diampu.

Penutup

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru dalam Rangka Penyelenggaraan RSBI di SMAN Mojoagung sesuai dengan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademis dan Kompetensi Guru sebagai berikut;

- 1) SMA Mojoagung pada dasarnya telah siap untuk mendapatkan predikat SBI. Namun dalam perjalanannya ada tahapan dan proses yang di lalui. Mulai dari kesiapan sekolah, bangunan sekolah, kurikulum ajaran dan yang terpenting adalah sumber daya pendidik. Untuk hal yang terakhir ini dapat disimpulkan bahwa hanya ada 5 guru yang berijazah S2 dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah hanya 3 orang atau 5,45% dari keseluruhan pendidik yang berjumlah 55 orang yang seharusnya 30% berkualifikasi S2/S3, termasuk tes TOEFL > 500.
- 2) Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Jombang, R-SMA-BI Mojoagung secara kompetensi sudah layak menjadi SBI, namun dari sisi lain yang belum memadai untuk memenuhi sebagaimana Permendiknas No.16 tahun 2007 yaitu tentang standar kualifikasi

akademik dan kompetensi guru, yaitu tentang kualifikasi akademis yang masih 9,09% atau sebanyak 5 guru yang berijazah S2 dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah hanya 3 orang atau 5,45%. dari keseluruhan pendidik yang berjumlah 55 orang yang seharusnya 30% berkualifikasi S2/S3, termasuk tes TOEFL >500. Hal ini jelas dapat berpotensi menghambat implementasi RSBI di SMAN Mojoagung.

- 3) Keprofesionalitasan guru memiliki keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesi yang akan dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilannya.
- 4) Peningkatan kualitas pendidik meliputi tiga kegiatan penting yang diperlukan yaitu: (1) Para guru harus memperbanyak tukar pikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman mengembangkan materi pelajaran dan berinteraksi dengan peserta didik. (2) Kedua, akan lebih baik kalau apa yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang dihadiri para guru adalah merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para guru sendiri. (3) guru harus membiasakan diri untuk mengkomunikasikan hasil penelitian yang dilakukan, khususnya lewat media cetak.

Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapat beberapa saran praktis yang peneliti perlu sampaikan demi sempurnanya implementasi dari kebijakan ini antara lain:

- 1) Perlu sinkronisasi kebijakan satu sama lain didalam mendukung studi lanjut ke S-2.
- 2) Perlu para pihak terkait, misal Kepala Sekolah, Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, dan pihak Perguruan Tinggi yang terakreditasi A segera bersama-sama membuat kebijakan dalam rangka studi lanjut ke S-2 untuk para guru RSBI.

Daftar Pustaka

- Ali, Faried. 1997. *Metodologi penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Jakarta: P T Raja Grafindo Persada.
- Assegaf, Abdul Rachman. 2003. *Internasionalisasi Pendidikan: Skesa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gama Media.
- Anderson, J.E. 1975, *Public Policy Making*. Hott Rinehart ang Witson, New York.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Cetakan ke tiga, Kencana Prenada Media Group.
- Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. 1994, *"Introduction : Entering the Field of Qualitative Research"*.
- Dye, Thomas R, Dalam Wahab, Solikin, A, 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Universitas Negeri Malang Press.
- Dunn, William N, *Publik Policy Analisisi dalam Nugroho, Riant 2009. Kebijakan Publik untuk Indonesia*, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Edward III, George C, 1980. *Implementing Policy*, Texas, A.M. University Congresional Quartily Press.
- Fadillah Putra, 2003. *Paradigma Kritis dalam studi Kebijakan Publik*. Surabaya, Pustaka Pelajar, (Cetakan Kedua), hal. 81.
- Grindle, S Marilee, 1980 , *Policy Content and Context in Implementation,-.*
- Horacio de J. Araujo da Concelcao. *Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Subsidi Bagi Lanjut Usia*. Tesis Universitas Airlangga.
- Jones, CO, 1991. *Pengantar Kebijakan Publik* (Diterjemahkan oleh Ricky Intanto Rajawali, Jakarta.
- Klop, 1978. *Development and first results of the Borderline Personality Inventory*, Göttingen : J Pers Assess
- Matthew, Miles dan A. Michael Huberman. 2009. *Analalisis Data Kualitatif* .Jakarta: Univesitas Indonesia
- Mazmanian, Daniel A. dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementasi dan Public Policy*. USA, Scott, Foresmann Company.
- Meter, Donald S. Van. and Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society*. Beverly Hills: Sage Publication
- Mitrani, Palziel and Fitt, 1992, *Competency Based Human Resources Management – Value – Driven Strategies for Recruitment, Development and Reward*, Hay Group Kogan.